

MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI DI KOTA BANDA ACEH

Ainul Fitri,¹ Murniati,² Bahrum.³

¹ Guru SMP Negeri 19 Percontohan Kota Banda Aceh, Indonesia

² Prodi Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

¹ Koresponden: ainulfitri649@yahoo.com

ABSTRACT

The aim of this research was to figure out the principal's management behavior in managing BOS fund at State Junior High Schools in Banda Aceh. This qualitative research was conducted by employing a descriptive method. The results showed that (1) the planning program was arranged at the beginning of each academic year by the school finance teams according to the results of discussions and meetings with the teachers, the members of school committee and the students' parents. The results were written in the school work and budget planning by considering 8 educational system standards of Indonesia in order to decide the priority scales based on the available fund. In addition, (2) the implementation of this program began with coordination and socialization. Moreover, the implementation was in accordance with the technical guidance of BOS fund distributed by the Education Board of Banda Aceh Municipality. It was also found that (3) monitoring and was done by the teachers, members of school committee, the principals, the inspectorate, the team of BOS fund from each school, the municipality, and the province. The monitoring report was submitted to the Local Government Agency (SKPD) every three month period. Lastly, (4) the limitations, the delays, and the society's misunderstanding related to BOS fund were the obstacles found in managing the BOS fund at the schools.

Keywords: management, principal, school operational assistance (bos) fund

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen kepala sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perencanaan program dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru yang dilakukan oleh tim keuangan sekolah dengan melibatkan guru, komite, dan orang tua murid melalui rapat dan hasil kesepakatan diprogramkan dalam RKAS yang berpedoman pada 8 SNP, menentukan skala prioritas dan analisis jumlah dana yang tersedia, (2) Pelaksanaan program diawali dengan melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak. Program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan berpedoman pada Juknis dana BOS yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, (3) Pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh guru, komite, kepala sekolah, tim BOS sekolah, BOS Kota dan tim BOS propinsi serta inspektorat setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Hasil pelaksanaan pengawasan dituliskan dalam laporan pertanggung jawaban setiap triwulan dan disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kota, dan (4) Hambatan yang dihadapi adalah penggunaan dana BOS terbatas pada kegiatan tertentu, terlambatnya pencairan dana BOS, pencairan dana tidak selalu sesuai dengan jumlah siswa, terbatasnya dana apabila dibandingkan dengan kebutuhan sekolah, adanya pemahaman masyarakat bahwa dana BOS diberikan supaya adanya sekolah gratis.

Kata kunci: Manajemen, Kepala Sekolah, dan Dana BOS.

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dan tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan sekolah dan tidak mungkin diabaikan dalam setiap proses pendidikan. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya yang

dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Fattah (2012) mengemukakan bahwa: "Pembiayaan pendidikan sekolah merupakan proses penggunaan pendapatan dan sumber daya yang tersedia untuk menformulasikan dan mengoperasikan sekolah di berbagai wilayah geografis dan

tingkat pendidikan yang berbeda-beda”. Pendapai ini menunjukkan bahwa keuangan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia adalah dengan ditetapkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan ditetapkan bahwa “BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.” Program dana BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa dan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu.

Setiap pengelola pendidikan harus memikirkan masalah pembiayaan pendidikan yang berhubungan dengan masalah gaji guru, proses pembelajaran, pembelian alat-alat pelajaran, biaya transportasi, sarana dan prasarana, pemasaran dan kebutuhan lainnya. Mulyasa (2013) mengemukakan bahwa: “Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan”

Kepala sekolah akan mudah dalam menjalankan tugasnya, apabila manajemen sekolah yang dikembangkannya mampu mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir dan menggerakkan sumber daya sekolah dalam rangka pencapaian

tujuan pendidikan. Menurut Hasibuan (2013) bahwa fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif persekolahan meliputi: “1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) pelaksanaan (*actuating*), dan 4) pengawasan (*controlling*).”

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa belum semua sekolah menggunakan dana BOS sesuai dengan 13 komponen dalam permendiknas 37 tahun 2012 masih menarik iuran diantaranya pembelian seragam, tambahan mata pelajaran dan perpindahan kelas (Nugroho, et.al 2013; Sumarni, 2015), dana BOS datang tidak tepat waktu, dan komite kurang memahami pengelolaan dana BOS, sehingga sekolah melakukan pinjaman dana serta berbelanja secara kredit, dan melakukan penguatan pada komite terkait dana BOS (Hawa, et.al, 2014).

Manajemen kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Kerjasama dapat dilakukan dengan memberdayakan partisipasi masyarakat atau komite sekolah (Fauziah et.al 2014; Susilawaty, et.al 2015; Ibrahim. 2015), sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan (Wardiah, 2015).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti melakukan suatu penelitian yang mendalam terkait pengelolaan dana BOS. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: (1) perencanaan program dana BOS, (2) pelaksanaan program dana BOS, (3) pengawasan dana BOS, dan (4) Hambatan-hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam pengelolaan

dana pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2015) bahwa: “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah secara mendalam dan mengadung makna berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori”. Dengan demikian, maka penelitian ini dilakukan untuk memahami fenomena-fenomena secara alamiah atas keunikan, dinamika, dan hakikat holistic terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengelola dana BOS di SMP Negeri 3 Banda Aceh, SMP Negeri 4 Banda Aceh dan SMP Negeri 5 Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, teknik observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengawas sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua MGMP, guru, dan komite sekolah sesuai dengan fokus masalah. Observasi dilakukan untuk mengecek kebenaran data yang diberikan melalui konfirmasi dan studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Kemudian peneliti mengumpulkan sejumlah data kualitatif (hasil wawancara) antara subjek yang satu dengan lainnya dibandingkan, kemudian dianalisis serta disesuaikan dengan data dokumenter, dan akhirnya disimpulkan. Analisis data dilakukan dengan cara: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Perencanaan Program Dana BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program kepala sekolah dalam mengelola dana BOS pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru dengan membentuk tim keuangan sekolah, kemudian melibatkan guru, pengurus komite sekolah, dan orang tua murid melalui rapat dan hasil kesepakatan tertulis dalam RKAS. Kegiatan perencanaan program terlebih dahulu menganalisis tentang program kegiatan yang berpedoman pada 8 SNP, menentukan skala prioritas dan analisis jumlah dana yang tersedia.

Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Supriadi (2010) mengemukakan bahwa: “Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah).”

Perencanaan pembiayaan merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh. Siswanto (2012) mengemukakan bahwa tahapan-tahapan aktivitas perencanaan meliputi: 1) perkiraan (*forecasting*), 2) penetapan tujuan (*establishing objective*), 3) pemrograman (*programming*), 4) penjadwalan (*scheduling*), 5) penganggaran (*budgetting*), 6) pengembangan prosedur (*developing procedure*), 7) penetapan dan interpretasi kebijakan (*establishing and interpreting policies*).

Pelaksanaan Program Dana BOS

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program dalam menggunakan dana BOS pada SMP Negeri di Banda Aceh diawali dengan melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan penggunaan dana BOS. Pelaksanaan program yang menggunakan dana BOS berpedoman pada petunjuk teknis (Juknis) yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh.

Penggunaan anggaran dalam pembiayaan pendidikan harus berpedoman pada konsep efisiensi dan efektivitas. Dalam pembiayaan pendidikan terdapat prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 48 Ayat (1) bahwa: “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”.

Semua kegiatan yang menghasilkan output yang berkualitas tidak terlepas dari ketersediaan biaya yang cukup. Menurut Rohiat (2010) bahwa pengembangan manajemen sekolah yang sesuai dengan SNP sesuai dengan program sekolah dapat dikembangkan di antaranya dengan: “(1) peningkatan kerjasama dengan *stakeholders*, (2) implementasi prinsip kemandirian, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan sustainabilitas program sekolah”. Optimalisasi fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan dalam setiap aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan. Hal ini dikarenakan biaya merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam suatu kegiatan di sekolah.

Pengawasan Dana BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan dana BOS pada SMP Negeri di Banda Aceh dilakukan secara bersama-sama oleh guru, komite, kepala sekolah, tim BOS sekolah, BOS Kota dan tim BOS Propinsi serta inspektorat. Pengawasan dilakukan setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Hasil pelaksanaan pengawasan dituliskan dalam laporan pertanggung jawaban setiap triwulanan dan disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan yang baik dapat dilakukan dengan selalu berpedoman kepada pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Johnson (Nasution, 2010) mendefinikan bahwa: “Pengawasan merupakan fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi.

Informasi yang diperoleh melalui kegiatan pengawasan sangat diperlukan untuk melihat hasil yang telah dicapai. Terry dan Leslie (2013) mengatakan bahwa: “Pengawasan anggaran dilakukan untuk mengungkapkan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Melalui ringkasan anggaran dapat dipastikan tanggung jawab untuk pelaksanaan dengan mudah. Penyimpangan-penyimpangan dengan cepat dapat dilihat dan dan dimintakan

penjelasana-penjelasan untuk perbedaaan-perbedaaan yang penting.”

Hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Dana BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh adalah tidak semua aktivitas dan pembangunan di sekolah dapat menggunakan dana BOS, terlambatnya pencairan dana BOS ke rekening sekolah, dana yang keluar tidak selalu sesuai dengan jumlah siswa, terbatasnya dana apabila dibandingkan dengan kebutuhan sekolah, adanya pemahaman masyarakat bahwa dana BOS diberikan supaya adanya sekolah gratis.

Tidak semua kebutuhan sekolah dapat didanai dari dana BOS, sehingga setiap sekolah memiliki hambatan masing-masing dalam pengelolaan dana BOS. Dengan demikian, kepala sekolah perlu menerapkan manajemen yang tepat agar tidak jauh menyimpang dari konsep, dan yang sesuai dengan objek tempat lembaga sekolah itu berada. Dalam pengelolaan dana BOS memerlukan sikap transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif secara simultan terhadap kemajuan sekolah (Raeni, 2014). Dengan demikian, sehingga menumbuhkan sikap kepemilikan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sekolah terhadap program yang dijalankan.

Pengambilan keputusan merupakan hak seluruh masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi terhadap sekolah sesuai mekanisme yang jelas. Seorang manajer

diperlukan keahlian menjadi tiga tingkat, yaitu: (1) mengerti perilaku masa lampau (*understanding past behavior*), (2) memprediksi perilaku masa depan (*predicting future behavior*) dan (3) pengarahan, perubahan, dan pengendalian perilaku (*directing, changing, and controlling behavior*) (Siswanto, 2012). Dengan demikian, kepala sekolah adalah tokoh sentral dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

KESIMPULAN

1. Perencanaan program dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru yang dilakukan oleh tim keuangan sekolah dengan melibatkan guru, komite, dan orang tua murid melalui rapat dan hasil kesepakatan dituliskan RKAS dengan menganalisis tentang program kegiatan yang berpedoman pada 8 SNP, menentukan skala prioritas dan analisis jumlah dana yang tersedia
2. Pelaksanaan program diawali dengan melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan. Program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan berpedoman pada Juknis dana BOS yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh
3. Pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh guru, komite, kepala sekolah, tim BOS sekolah, BOS Kota dan tim BOS propinsi serta inspektorat setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Hasil pelaksanaan pengawasan dituliskan dalam laporan pertanggung jawaban setiap

- triwulan dan disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
4. Hambatan yang dihadapi adalah penggunaan dana BOS terbatas pada kegiatan tertentu, terlambatnya pencairan dana BOS, pencairan dana tidak selalu sesuai dengan jumlah siswa, terbatasnya dana apabila dibandingkan dengan kebutuhan sekolah, adanya pemahaman masyarakat bahwa dana BOS diberikan supaya adanya sekolah gratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, Murniati AR, Djailani. 2014. Pemberdayaan Komite Sekolah Oleh Kepala Sekolah Pada SDIT Nurul Fikri Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 2(1), 77-88.
- Hasibuan, M. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ibrahim. 2015. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SD Negeri Sakti Pidie. *Jurnal Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana Unsyiah*, 3 (1), 116- 125.
- Mulyasa, E. 2013. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution, Z. 2010. *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan (Konsep, Fenomena dan aplikasinya)*. UMM Press, Malang.
- Nugroho, R.W., Widowati, N. and Rihandoyo, R., 2013. Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan Tahun 2011). *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(1), 171-178.
- Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan.
- Raeni, R., 2014. Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas SMK. *Economic Education Analysis Journal*, 3(1), 143-151.
- Rohiat. 2010. *Manajemen Sekolah (Teori Dasar dan Praktik)*. Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto, H.B. 2012. *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sumarni, N., 2015. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 6 Satap Rambah Samo. *Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi*, 2(1), 1-6.
- Supriadi, D. 2010. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Susilawaty, Harun, C.Z, Khairuddin. 2015. Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah di SD Negeri 4 Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 1(2). 34-47.
- Terry, G. R dan Leslie W. Rue. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wardiah, S., 2015. Strategi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Lhoknga. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(2), 12-21.